



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab,II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang penanaman modal, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan SKPD yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petangungjawaban pengelolaan keuangan DPMPTSP Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2019.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2019.



B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan:

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);



- l) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- w) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019;
- x) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
- y) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
- z) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10);



- aa) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 9);
- bb) Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69);
- cc) Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 Nomor 66);
- dd) Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 Nomor 65);
- ee) Peraturan Bupati Batang Nomor 56 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2019 Nomor 36).
- ff) Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2019 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan LRA
 - 2. Belanja
- B. Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
- C. Laporan Operasional
 - 1. Pendapatan LO
 - 2. Beban
 - 3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional



D. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal
2. Surplus / Defisit LO
3. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

REALISASI PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAH
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

NO. REK	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SALDO	
				(Rp)	(%)
1	WAJIB	1,349,613,000	1,477,647,880	128,034,880	0.09
2	PILIHAN				

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
DPMPTSP KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019

NO. REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI SALDO	%
1	URUSAN WAJIB	5,162,453,759	5,078,386,799	97,57%
2	URUSAN PILIHAN			
JUMLAH		5,162,453,759	5,078,386,799	

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada DPMPTSP Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan
Secara umum untuk pendapatan tidak ada kendala terbukti dengan pendapatan melebihi target, yang disebabkan :
 - a. Untuk Retribusi IMB dikarenakan banyak investor tertarik dengan kondusifitas sosial masyarakat Batang dan harga tanah yang masih relatif terjangkau, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang masuk terutama disektor properti;
 - b. Sedangkan Retribusi IMTA dikarenakan adanya proyek strategis PLTU, yang mana telah memasuki tahap konstruksi hingga PT. BPI banyak memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Belanja
Secara umum hambatan dalam penyerapan belanja adalah sebagai berikut :
 - a. Selisih harga pagu dengan harga peroleh barang;
 - b. Dan adanya kesesuaian dengan kebutuhan.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja .
Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.
Realisasi PAD Tahun 2019 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah			
1 Pajak Daerah	-	-	
2 Hasil Retribusi Daerah	1,348,613,000	1,475,528,000	1,538,148,900
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
4 Lain-lain PAD yang Sah	1,000,000	2,119,880	4,131,300
	1,349,613,000	1,477,647,880	1,542,280,200

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD Tahun 2019 lebih besar Rp. 128.034.880 atau 9,49%.
Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, realisasi PAD Tahun 2019 lebih sedikit Rp. 62.620.900 atau menurun 2%. disebabkan karena khusus untuk Retribusi IMB diharapkan mengalami kenaikan pendapatan yang tinggi setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW tetapi karena penetapannya mendekati akhir tahun jadi belum maksimal.
Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2019 dan 2018 diuraikan sebagai berikut:



1) **Realisasi Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi retribusi Daerah pada DPMPSTSP Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan

Hasil Retribusi Daerah:	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,019,250,000.00	1,035,385,000.00	919,773,400.00
Retribusi Trayek	19,613,000.00	13,895,000.00	-
Retribusi IMTA	309,750,000.00	426,248,000.00	618,217,800.00
	-	-	-
	1,348,613,000.00	1,475,528,000.00	1,537,991,200.00
Jumlah Hasil Retribusi	1,348,613,000.00	1,475,528,000.00	1,537,991,200.00

anggarannya, realisasi hasil retribusi Daerah DPMPSTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 menurun Rp. 62.463.200 atau 2% dibanding Tahun 2018.

Adapun penjelasan masing-masing Retribusi bila dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut :

Retribusi Peijinan Tertentu :

- a) *Retribusi ijin Mendirikan Bangunan melebihi dari target sebesar Rp. 16.135.000 atau 1% walaupun mengalami kenaikan tapi belum maksimal;*
- b) *Retribusi Trayek belum memenuhi target yaitu masih kurang Rp. 5.718.000 ini dikarenakan berkurangnya jumlah armada yang beroperasi sehingga tidak memperpanjang surat-suratnya;*
- c) *Retribusi IMTA melebihi dari target sebesar Rp. 116.498.000 atau 10% adanya proyek PLTU, yang mana masih dalam tahap konstruksi hingga PT. BPI banyak memperkerjakan Tenaga Kerja Asing walaupun jumlahnya berkurang dari tahun 2018.*

2) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain- lain Pendapatan Asli daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Lain-lain PAD yang Sah	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan denda retribusi		2,119,880	114,500

b. Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja DPMPSTSP Kabupaten Batang tahun 2019 adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	4,385,701,259.00	4,328,129,299.00	-	98.69%
2	BELANJA MODAL	776,752,500.00	750,257,500.00	-	96.59%
	JUMLAH	5,162,453,759.00	5,078,386,799.00	-	98.37%

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2019 lebih rendah Rp. 84.066.960 atau 1,63% Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 maka realisasi belanja tahun 2019 naik 0.8 %. *Untuk anggaran belanja secara keseluruhan di tahun 2019 mengalami penurunan di banding tahun 2018 dikarenakan Dinas Ketenagakerjaan sudah pisah dari DPMPTSP Kabupaten Batang.*

Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2019 dengan realisasi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

		2019	2018		
NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4,385,701,259.00	4,328,129,299.00	8,230,084,280.00	
2	Belanja Modal	776,752,500.00	750,257,500.00	257,762,000.00	
	JUMLAH	5,162,453,759.00	5,078,386,799.00	8,487,846,280.00	

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

1) BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. Belanja operasi DPMPTSP Kabupaten Batang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi:	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	2,773,739,339.00	2,726,377,092.00	3,728,461,655.00
Belanja Barang	1,611,961,920.00	1,601,752,207.00	4,501,622,625.00
	4,385,701,259.00	4,328,129,299.00	8,230,084,280.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2019 lebih rendah Rp. 57.571.960 atau 1,31%, Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, realisasi belanja operasi Tahun 2019 lebih besar 1,2 %.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Gaji dan Tunjangan	1,667,747,466.00	1,639,525,672.00	98.31	28,221,794.00	1.69
Tambahan Penghasilan PNS	794,791,873.00	775,701,420.00	97.60	19,090,453.00	2.40
Insentif Pemungutan Retribusi daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	-	
	2,522,539,339.00	2,475,227,092.00	98.12	47,312,247.00	1.88
Belanja Langsung:					
Honorarium PNS	188,700,000.00	188,650,000.00	99.97	50,000.00	0.03
Honorarium Non PNS	62,500,000.00	62,500,000.00	100.00	-	-
Uang Lembur	-	-	-	-	#DIV/0!
Belanja pegawai BLUD	-	-	-	-	
	251,200,000.00	251,150,000.00	99.98	50,000.00	0.02
	2,773,739,339.00	2,726,377,092.00	98.29	47,362,247.00	1.71

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 2.773.739.339 (98,29%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 47.362.247 (1,71%).

b) Belanja Barang

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	180,601,500.00	178,578,500.00	98.88	(2,023,000.00)	(1.12)
Belanja Jasa Kantor	477,490,500.00	474,815,548.00	99.44	(2,674,952.00)	(0.56)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155,241,900.00	153,878,449.00	99.12	(1,363,451.00)	(0.88)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	129,831,100.00	129,830,500.00	100.00	(600.00)	(0.00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82,000,000.00	82,000,000.00	100.00	-	-
Belanja Makan Minum	58,215,000.00	55,065,000.00	94.59	(3,150,000.00)	(5.41)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	307,693,520.00	307,611,050.00	99.97	(82,470.00)	(0.03)
Belanja Pemeliharaan	67,688,400.00	67,128,160.00	99.17	(560,240.00)	(0.83)
Belanja Jasa konsultasi	115,000,000.00	114,645,000.00	99.69	(355,000.00)	(0.31)
Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara	37,000,000.00	37,000,000.00	100.00	-	-
Jumlah	1,611,961,920.00	1,601,752,207.00	99.37	(10,209,713.00)	(0.63)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp. 1.601.752.207 atau 99,37% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.209.713 atau 0,63%.

2) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2019		Tahun 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	766,752,500.00	750,257,500.00	257,762,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	766,752,500.00	750,257,500.00	257,762,000.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2019 lebih rendah Rp. 26.495.000 atau 3,41% Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi belanja modal Tahun 2019 lebih rendah Rp. 3,33%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap.

B. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Batang terbagi dalam :

<i>Uraian</i>	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Aset Lancar	2,391,750.00	2,786,800.00
2. Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap	5,431,629,332.00	5,057,646,446.00
4. Aset Lainnya	178,750.00	178,750.00
	5,434,199,832.00	5,060,611,996.00

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penambahan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di DPMPSTSP Kabupaten Batang yaitu sebesar Rp. 5.060.611.996 atau 33,62%.

a. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1 Kas di Kasda	-	
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
3 Kas di Bendahara Penerimaan	-	
4 Kas di BLUD	-	
5 Kas Lainnya	-	
6 Piutang Pajak Daerah	-	
7 Piutang Retribusi	-	
8 Penyisihan Piutang tak tertagih	-	
9 Belanja Dibayar Dimuka	-	
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	
13 Piutang Lainnya	-	
12 Persediaan	2,391,750.00	2,786,800.00
	2,391,750.00	2,786,800.00

1) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 di DPMPSTSP Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	2,391,750.00	2,786,800.00
2 Persediaan Obat-obatan medis	-	
3 Persediaan Obat-obatan ternak	-	
4 Persediaan Rumah tangga	-	
5 Persediaan Benda Berharga	-	
6 Persediaan Lainnya	-	
	2,391,750.00	2,786,800.00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing DPMPSTSP Kabupaten Batang. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akandiserahkan kepada masyarakat. Sampai tanggal 31 Desember 2019 belum diserahkan kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan hukum.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

- Persediaan alat tulis kantor/Pakai Habis
Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.391.750 dengan perincian terlampir.

b. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada DPMPSTSP Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp. 5.431.629.332 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah				-
Peralatan dan Mesin	2,425,536,033.00	1,358,707,500.00	395,255,000.00	3,388,988,533.00
Gedung dan Bangunan	4,484,762,804.00		-	4,484,762,804.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	199,349,500.00	-	-	199,349,500.00
Aset tetap lainnya	12,999,972.00		-	12,999,972.00
pengerjaan				-
	7,122,648,309.00	1,358,707,500.00	395,255,000.00	8,086,100,809.00

Nilai aset tetap per 31 Desember 2019 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodifikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Penambahan aset tetap

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Realisasi Belanja Modal 2019 (Rp)
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	750,257,500.00
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	750,257,500.00

b) Penambahan Aset dari SKPD lain dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Belanja Modal 2019 (Rp.)
1. Tanah	
2. Peralatan dan Mesin	1.193.939.750,00
3. gedung dan Bangunan	889.174.775,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.070.000,00
5. Aset tetap lainnya	
6. Konstruksi dalam pengerjaa	
	2.109.184.525,00



- c) Penambahan Aset dari mutasi antar rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Bukan Belanja Modal</i>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	39,915,000.00
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>39,915,000.00</u>

Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarnya masih terletak di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa.

2) Pengurangan Aset tetap

- a) Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>mutasi Antar SKPD</i>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	355,340,000.00
3 Gedung dan Bangunan	-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	-
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>355,340,000.00</u>

- b) Pengurangan aset tetap karena mutasi antar rekening terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>mutasi antar rekening</i>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	39,915,000.00
3 Gedung dan Bangunan	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>39,915,000.00</u>

1) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.425.536.033 naik sebesar Rp. 1.588.857.250,00 atau 65,51 % dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2019 sebesar Rp. 4.014.393.283,00

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

<i>Peralatan dan Mesin</i>	Neraca Per 31 Des 2019	Neraca Per 31 Des 2018	Naik (turun)
Alat-alat besar	-	-	-
Alat -alat angkutan	1,115,402,214.00	902,207,214.00	213,195,000.00
alat-alat bengkel dan alat ukur	-	-	-
alat-alat pertanian dan peternakan	2,656,500.00	2,656,500.00	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	2,716,569,903.00	1,415,012,653.00	1,301,557,250.00
alat-alat studio dan komunikasi	169,764,666.00	95,659,666.00	74,105,000.00
alat-alat kedokteran	-	-	-
alat-alat laboratorium	-	-	-
alat-alat keamanan	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	4,014,393,283.00	2,425,536,033.00	1,588,857,250.00

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2019 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp. 389.662.862,00 terdiri dari :

- (1) Belanja Modal sebesar Rp. 750.257.500,00
- (2) Selain Belanja Modal sebesar Rp. 608.450.0000 berasal dari :

Uraian	Mutasi Tambah (Rp)
APBN	
APBD	
Hibah	
Koreksi	
Reklasifikasi	39.915.000
Aset dari belanja barang dan jasa	
Mutasi dari SKPD lain	568.535.000
JUMLAH	608.450.000

b) Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2019 sebesar Rp. 900.000 dengan perincian sebagai berikut :

Mutasi Kurang (Rp)

1 Hibah	
2 Koreksi	
3 Rusak Berat	
4 Extracountable	-
5 Reklasifikasi	39,915,000.00
6 Mutasi ke SKPD lain	355,340,000.00
	Rp 395,255,000.00



2) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca DPMPTSP Kabupaten Batang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.373.937.579,00 naik sebesar Rp. 889.174.775,00 atau 19,83% sedang nilai di neraca 2018 adalah Rp. 4.484.762.804,00 kenaikan angka tersebut berasal dari DPU PR terkait dengan bangunan MPP.

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 225.409.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.070.000,00 atau 100,02% dari nilai yang tersaji pada neraca 2018 sebesar Rp. 199.349.500,00 Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2019:

	neraca per 31 Des 2019	neraca per 31 Des 2018	Naik (turun)
<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>			
Jalan dan Jembatan	153,484,500.00	153,484,500.00	-
Bangunan air	-	-	-
Instalasi	52,135,000.00	26,065,000.00	26,070,000.00
Jaringan	19,800,000.00	19,800,000.00	-
	225,419,500.00	199,349,500.00	26,070,000.00

4) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca DPMPTSP Kabupaten Batang per 31 Desember 2019 sebesar Rp.12.999.972,00 sama dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2018.
Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<i>Aset Tetap Lainnya</i>	neraca per 31 Des 2019	neraca per 31 Des 2018	Naik (turun)
Buku dan Kepustakaan	12,999,972.00	12,999,972.00	-
Barang Bercorak Seni			
Kebudayaan	-	-	-
Hewan, ternak dan			
Tumbuhan	-	-	-
	12,999,972.00	12,999,972.00	-

3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2019 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2018 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2019	Neraca Per 31 Des 2018 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2,665,711,783)	(2,001,548,291.00)	(664,163,492.00)
	(2,665,711,783)	(2,001,548,291.00)	(664,163,492.00)



c. ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

SKPD	Neraca Per 31 Des 2019	Neraca Per 31 Des 2018	Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
Aset tak Berwujud	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset lain-lain	178,750.00	178,750.00	-
	178,750.00	178,750.00	-

1. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2019, kewajiban DPMPSTSP Kabupaten Batang terdiri dari:

Uraian	Neraca Per 31 Des 2019	Neraca Per 31 Des 2018	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	238,367,700.00	426,416,560.00	(188,048,860.00)
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	238,367,700.00	426,416,560.00	(188,048,860.00)

a. Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek DPMPSTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Hutang Bunga	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan di terima dimuka	161,735,000.00	347,223,225.00
Hutang Belanja	76,632,700.00	79,192,335.00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	238,367,700.00	426,415,560.00

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

1) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2019 sebesar Rp. 161.735.000,00 dari pendapatan retribusi Rp. 424.248.000,00

2) Hutang Belanja.

Meliputi Utang listrik, telpon, air dan TPP bulan Desember 2019 yang baru dibayar bulan Januari 2020 sebesar Rp. 76.632.700,00



2. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Ekuitas	6,725,231,351.00	4,634,185,436.00
	6,725,231,351.00	4,634,185,436.00

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada tahun 2019 Pendapatan-LO DPMPTSP Kabupaten Batang direalisasikan sebesar Rp. 1.663.136.105,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.387.494.090,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 275.642.015,00 atau 9 %.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2019 dengan tahun 2018 sebagai berikut :

	Tahun 2019 Realisasi (Rp)	Tahun 2018 Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Pendapatan Asli Daerah	1,661,016,225.00	1,387,379,590.00	273,636,635.00	119.72
2 Pendapatan Transfer	-	-	-	#DIV/0!
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	2,119,880.00	114,500.00	2,005,380.00	1,851.42
	1,663,136,105.00	1,387,494,090.00	275,642,015.00	119.87

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2018, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan penurunan sebesar Rp. 2.005.380,00.

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:



<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
1 Pajak Daerah	-		-	#DIV/0!
2 Hasil Retribusi Daerah	1,661,016,225.00	1,387,379,590.00	273,636,635.00	119.72
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
4 Pendapatan Asli Daerah lainnya	2,119,880.00	114,500.00	2,005,380.00	1,851.42
	1,663,136,105.00	1,387,494,090.00	275,642,015.00	119.87

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terdapat jenis pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Rp. 275.642.015,00

1) **Pendapatan Retribusi Daerah.**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :

<i>Hasil Retribusi Daerah:</i>	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-		-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan	-		-	#DIV/0!
Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil	-		-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln	-		-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Pasar	-		-	#DIV/0!
Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor	-		-	#DIV/0!
Retribusi Pengendalian Menara	-		-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-		-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Pelelangan	-		-	#DIV/0!
Retribusi terminal	-		-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-		-	#DIV/0!
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	-		-	#DIV/0!
Retribusi Rumah Potong Hewan	-		-	#DIV/0!
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-		-	#DIV/0!
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-		-	#DIV/0!
Retribusi Siaran Radio Abirawa	-		-	#DIV/0!
	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,035,385,000.00	919,773,400.00	115,611,600.00	(112.57)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	43,200.00	(43,200.00)	-
Retribusi Izin Trayek	13,895,000.00	-	13,895,000.00	#DIV/0!
Retribusi Izin Usaha	-	-	-	#DIV/0!
Retribusi IMTA	426,248,000.00	618,217,800.00	(191,969,800.00)	
	1,475,528,000.00	1,538,034,400.00	(62,506,400.00)	95.94
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	1,475,528,000.00	1,538,034,400.00	(62,506,400.00)	(95.94)

Pendapatan retribusi yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp. 1.475.528.000,000 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 1.661.016.225,00 Terdapat selisih sebesar Rp. 185.488.225,00 dengan penjelasan sebagai berikut :



Pendapatan Retribusi Daerah	Penerimaan Kas (LRA)	Piutang 2019	Piutang 2018	Pendapatan diterima dimuka 2018	Pendapatan diterima dimuka 2019	Total
Retribusi Jasa Tertentu						
Retribusi IMB	1,035,385,000					1,035,385,000
Retribusi HO	-					-
Retribusi Trayek	13,895,000					13,895,000
Retribusi IMTA	426,248,000			347,223,225	161,735,000	611,736,225
						-
Jumlah	1,475,528,000	-	-	347,223,225	161,735,000	1,661,016,225

Pada tahun 2019 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.661.016.235,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 273.636.635,00 dari semula tahun 2018 sebesar Rp. 1.387.379.590,00.

2) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.119.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.005.380,00 atau 90% bila dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 114.500,00 Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya selama tahun 2019 :

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	#DIV/0!
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi	2,119,880.00	114,300.00	2,005,580	1,854.66
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Dari Pengembalian	-	-	-	#DIV/0!
Fasilitas Sosial dan fasilitas umum	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan BLUD	-	-	-	#DIV/0!
Pendapatan BPJS Keshtn	-	-	-	#DIV/0!
	2,119,880.00	114,300	2,005,580	1,854.66

2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.



Selama tahun 2019, beban DPMPSTSP Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. 4.696.951.491,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 8.525.366.375,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. 3.828.514.884,00 atau 55,09%, dikarenakan adanya pemisahan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Berikut realisasi beban 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 :

<i>Beban</i>	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2,473,632,032	3,269,346,840	(795,714,808)	75.66
Beban Persediaan	178,973,550	963,663,250	(784,689,700)	(18.57)
Beban Jasa	1,144,740,473	2,919,314,322	(1,774,573,849)	39.21
Beban Pemeliharaan	221,006,609	415,526,109	(194,519,500)	53.19
Beban Perjalanan Dinas	307,611,050	520,092,832	(212,481,782)	59.15
Beban Penyusutan	370,987,777	437,523,022	(66,535,245)	84.79
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	#DIV/0!
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Barang dan Jasa	-	-	-	#DIV/0!
	4,696,951,491	8,525,466,375	(3,828,514,884)	55.09

a. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.269.346.840,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 4.005.070.198,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 735.723.358,00 atau naik sebesar 81.63%.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

<i>Beban Pegawai</i>	Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS	1,639,525,672.00
Tambahan Penghasilan PNS	775,701,420.00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta KDH/WKDH	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60,000,000.00
Uang Lembur	-
Belanja Pegawai BLUD	
TPP Desember 2019	63,798,875.00
	2,539,025,967.00
TPP Desember 2018	65,393,935.00
Jumlah	2,473,632,032.00

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 178.973.550,00 sedangkan pada tahun 2018 beban persediaan adalah sebesar Rp. 963.663.250,00 sehingga berkurang sebesar Rp. 784.689.700,00 atau 18,57 %. Beban Persediaan terdiri dari :



Bahan Pakai Habis	178,578,500.00
Bahan Material	-
Cetak dan Penggandaan	
Jasa Konsultasi	
Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke masy	-
Persediaan Desember 2018	2,786,800.00
	181,365,300.00
Persediaan Desember 2019	2,391,750.00
Jumlah	178,973,550.00

c. Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.144.738.973,00 sedangkan pada tahun 2018 beban jasa adalah sebesar Rp. 2.919.314.322,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.774.475.349,00 atau turun 39,21% dikarenakan adanya pemisahan dengan Dinas Ketenagakerjaan.

Beban Jasa terdiri dari :

Beban Jasa	Nominal (Rp)
Honorarium PNS	188,650,000.00
Honorarium Non PNS	62,500,000.00
Jasa Kantor	474,815,548.00
Premi Asuransi	
Cetak dan Penggandaan	129,830,500.00
Sewa	82,000,000.00
Makan Minum	1,200,000.00
Pakaian dinas	307,611,050.00
Belanja Kursus dan Sosialisasi	
Jasa Konsultasi	114,645,000.00
Survey dan Penyusunan Design	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	
Belanja JKN	
Uang yang diberikan ke	
Belanja Jasa Narasumber	37,000,000.00
Belanja Telp, listrik air 2019	12,833,825.00
	1,411,085,923.00
Belanja Telp, listrik air 2018	13,799,400.00
	1,397,286,523.00

d. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 221.006.609,00 sedangkan pada tahun 2018 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp. 415.526.109,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 194.519.500,00 atau naik sebesar 53,19%.

Beban pemeliharaan tahun 2019 terdiri dari :



Beban Pemeliharaan	Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor	153,878,449.00
Pemeliharaan gedung, dll	67,128,160.00
	221,006,609.00

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 307.611.050,00 sedangkan pada tahun 2018 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp. 520.092.832,0 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 212.481.782,00 atau naik sebesar 59,15%.

Beban Perjalanan Dinas	Nominal (Rp)
Belanja kursus, pelatihan dan sosialisasi	
Pakaian Dinas	
Perjalanan Dinas	307,611,050.00
	307,611,050.00

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 370.987.777,00 sedangkan pada tahun 2018 beban penyusutan adalah sebesar Rp. 437.523.022,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 66.535.245,00 atau turun sebesar 84,79%

3. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2019, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.387.494.090,00 dan realisasi beban Rp. maka DPMPTSP Kabupaten Batang mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 3.033.815.386,00 Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2018 sebesar Rp. 7.137.872.285,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 4.104.056.899,00 atau naik sebesar 42,50%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	1,663,136,105.00	1,387,494,090.00	275,642,015.00	119.87
Beban	4,696,951,491.00	8,525,366,375.00	(3,828,414,884.00)	55.09
Jumlah	(3,033,815,386.00)	(7,137,872,285.00)	4,104,056,899.00	42.50



D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.634.185.436,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2018.

2. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.022.563.580,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2019 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2019.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp. 5.124.861.301,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2019 (Rp)
1 Penambahan aset tetap	2,109,184,525.00
2 Penambahan aset tetap dari pindahan antar rekening	39,915,000.00
3 Pengurangan aset tetap	(355,340,000.00)
4 Pengurangan aset tetap dari pindahan antar rekening	(39,915,000.00)
5 Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang dihapuskan	
6 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke SKPD lain	63,453,572.00
7 Perhitungan akumulasi penyusutan AT dari SKPD SKPD lain	(293,175,715.00)
8 Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke Aset Lainnya	
9 Perhitungan hutang Retensi	
10 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	
11 Perhitungan hutang jangka pendek lainnya	
12 Surplus/Defisit LRA	3,600,738,919.00
	<u>5,124,861,301.00</u>

Berikut penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan aset tetap sebesar Rp. 395.830.00,00 terdiri dari :

Pengurangan Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)
Pengurangan karena penghapusan	
Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain	355,915,000.00
Pengurangan karena Hibah	
Pengurangan karena SK Koreksi	
Pengurangan karena rusak berat	
Pengurangan karena extracountable	-
Pengurangan karena pindahan antar rekening	39,915,000.00
Pengurangan karena Lain-lain	
Jumlah	<u>395,830,000.00</u>



b. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke SKPD Lain

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke SKPD lain sebesar Rp. 293.175.715,00 merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain .

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 6.725.231.351,00 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2018 sebesar Rp. 4.634.185.436,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.091.045.915,00 atau turun sebesar 45,12 %.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan DPMPSTSP Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2019 pada DPMPSTSP Kabupaten Batang Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan DPMPSTSP Kabupaten Batang Tahun 2019. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 2 Januari 2020

KEPALA DPMPSTSP
KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004